

ABSTRAK

- (A) Nama : Muhammad Apriodi Effendy; NIM: 205170243
- (B) Judul Skripsi : Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Analisis Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 458/K/TUN/2017).
- (C) Halaman :
- (D) Kata kunci : Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Atas Tanah
- (E) Isi :
- Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis pejabat administrasi negara (beschikking) yakni “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu objek Peradilan Tata Usaha Negara tetapi UUPTUN tidak mengatur dengan jelas mengenai sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan sebelum diundangkannya UUPTUN merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak sehingga perlu adanya aturan yang mengatur dengan jelas permasalahan ini sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum.
- (F) Acuan :
- (G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Muhammad Apriodi Effend

